

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat Minangkabau tradisional, dikenal model kepemimpinan yang di sebut dengan *tigo tali sapilin*, yaitu: Penghulu/ninik mamak, cerdas pandai dan alim ulama. Secara geografis Minangkabau terdiri dari wilayah inti yang disebut dengan *darek* dan *rantau*. Dalam filosofi Minangkabau disebut *darek bapanghulu, rantau barajo*.¹ Jika dilihat dari pernyataan tersebut, yang memiliki penghulu seyogyanya adalah daerah inti (*darek*).

Dalam perkembangannya, masyarakat Minangkabau yang bergerak ke rantau juga mengikuti sistem tradisionalnya yang dianutnya di darek. *Penghulu nan salapan suku* adalah salah satu bentuk migrasinya masyarakat Minangkabau ke wilayah rantau khususnya kota Padang. Dari sumber tradisi lisan yang diperoleh, Suku Nan Salapan berasal dari Solok, lebih dikenal dengan Konfederasi Kubung Tigo Baleh.

Dengan bermigrasi masyarakat Minangkabau dari wilayah darat ke rantau, sekaligus juga diiringi dengan bermigrasinya kelompok masyarakat atau suku tersebut dengan membawa sistem sosial dan tradisi yang mereka miliki. Pada masa kolonial di kenal terdapatnya kelompok yang bermigrasi ke rantau (kota Padang) dikenal dengan *penghulu delapan suku*. Merujuk pada sejarahnya delapan suku ini berasal Solok Selayo.²

¹ A.A. Navis. (1986).” *Alam Takambang Jadi Guru*”, Jakarta:Grafiti Press; H. Maso’ed Abidin. (2016), *Tiga Sapilin: Surau untuk Bangsa*, (Yogyakarta: Gre- Publishing)

² Mardanas Sofwan,dkk. (1987)“*Sejarah Kota Padang*”.Jakarta. hal 12. Lihat juga Zaiyardam Zubir (dkk). (2018).”*Sejarah Kota Solok 1956-2018*”.hal 29.

Berdasarkan historiografi tradisional Minangkabau (Tambo), menjelaskan bahwa kepemimpinan tradisional masyarakat Minangkabau terdiri dari dua kelurahan, yaitu; kelurahan Bodi Caniago dan Kelurahan Koto Piliang. Kelurahan Bodi Caniago dipimpin oleh Datuak Perpatih Nan Sabatang, sedangkan Kelurahan Koto Piliang dipimpin oleh Datuak Katumanggunan. Secara tradisional, mereka mewarisi hak untuk menjadi pemimpin masyarakat. Tak hanya itu, mereka juga berhak mewariskan jabatan tersebut kepada anak atau kemenakannya.

Dalam struktur kepenghuluan Delapan Suku terlihat didalamnya dua kelurahan tersebut. Penghulu nan Salapan Suku merupakan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh delapan orang penghulu yang terdiri dari delapan suku. Masing-masing suku memiliki seorang penghulu. Disebut Penghulu Delapan Suku karena terdapat Delapan Suku dalam struktur kepenghuan tersebut. Dari delapan penghulu ini diketuai oleh seorang kepala *Wijk*.³ Sekarang, Kantor Kepengurusan penghulu nan Salapan Suku ini terletak di Jalan Imam Bonjol No.19 Padang.

Seiring dengan berdirinya lembaga KAN, pada tahun 1662, Penghulu Nan Salapan Suku ini membentuk suatu lembaga yang menaunginya yaitu dengan berdirinya KAN Niniak Mamak Nan Salapan Suku. Masyarakat Kota Padang tidak banyak mengetahui dengan pasti sejarah Delapan Suku ini. Hal ini juga menjadi alasan penting mengapa dilakukan penelitian ini. Tercatat dari tahun 1450 sampai 1556 yang pertama sekali datang ke daerah Padang adalah Datuak Sangguno Dirajo dari suku Tanjung, lalu Datuak Patah Karsani dari Suku Malayu, ketiga adalah Datuak Maharajo Basa dari suku Caniago dan yang

³ Pamflet KAN Niniak Mamak Nan Salapan Suku.

terakhir yaitu Datuak Panduko Magek dari Suku Jambak.⁴ Keempat orang tersebutlah yang menjadi cikal bakal pembentukan penghulu nan salapan suku.

Wilayah Minangkabau telah menjadi bagian dari administratif setingkat *Gouvernement* atau *Residentie* yang juga disebut *Sumatra's Westkust*.⁵ Pengaruh Hindia Belanda sangat kuat dalam unit pemerintahan atau posisi-posisi politik tradisional yang ada di Minangkabau. Hal ini disebabkan oleh lamanya kekuasaan Hindia Belanda. Oleh karena itu, kelompok elit merasa diuntungkan dengan kehadiran Kolonial Belanda.

Memasuki abad ke-19, Gubernur Jenderal Belanda menetapkan Kota Padang sebagai daerah otonom (*Gemeente*). *Gemeente* dalam struktur pemerintahan Kerajaan Belanda adalah kota. Struktur itu yang kemudian diadopsi untuk wilayah koloni. Kemudian, salah sataanya Padang diresmikan menjadi sebuah kota, yang merupakan wujud sistem desentralisasi pemerintahan kolonial. Hal ini merupakan upaya modernisasi pemerintahan Hindia Belanda pada zaman itu. Hal ini berdampak pada keberadaan Penghulu Nan Salapan Suku termasuk dalam perwakilan kewilayahannya.

Akibat perluasan wilayah Kota Padang membuat mengecilnya peranan penghulu secara administratif ke wilayahan, namun kewewenangan penghulu delapan suku tetap berlangsung sesuai dengan sistem otorisasi sistem pemerintahan tradisional. Akan tetapi, apakah ini berpengaruh terhadap otoritas dan peran kepemimpinan tersebut, terutama dalam kehadiran pemerintahan kolonial di wilayah ini. Dengan demikian, alasan ini membuat peneliti tertarik mengkaji

⁴ Ibid hal 13

⁵Gusti Asnan. <https://sejarahsumatra.com/2021/01/12/pemerintahan-bumiputra-inlandsche-bestuur-di-sumatra-barat/>. Diakses pada 08-01-2021 pada pukul 10.00 WIB.

masalah ini. Penelitian ini diberi judul “ **PENGHULU NAN SALAPAN SUKU DI KOTA PADANG MASA KOLONIAL** “

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penulis menjabarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Latar Belakang terbentuknya penghulu nan salapan suku di Kota Padang masa kolonial?
2. Bagaimana penghulu nan salapan suku mengembangkan peranannya di Kota Padang masa kolonial?
3. Apakah bentuk peningkatan status Kota Padang mempengaruhi keberadaan penghulu nan salapan suku masa kolonial?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, bahwasanya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengungkapkan latar belakang terbentuknya penghulu nan salapan suku di Kota Padang masa kolonial.
2. Untuk mengetahui seperti apa peranan penghulu nan salapan suku di Kota Padang masa kolonial.
3. Untuk menjelaskan mengenai peningkatan status Kota Padang dalam mempengaruhi keberadaan penghulu nan salapan suku masa kolonial.

Manfaat penelitian ini diharapkan bisa memberikan andil dan turut berpartisipasi terhadap kajian-kajian akademik tentang pemerintahan tradisional suatu daerah yang dulunya dikuasai oleh kolonial Belanda dengan membentuk suatu sistem lembaga adat yang dipimpin oleh seorang penghulu. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pendorong untuk melahirkan karya-karya yang bersifat ilmiah lainnya yang masih belum banyak diketahui oleh khalayak umum. Serta tentunya penelitian ini dapat memperkaya penulisan sejarah yang ada di Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas.



D. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penulisan sebuah penelitian diperlukan beberapa literatur atau sumber baik untuk memperkaya pengetahuan mengenai sebuah permasalahan yang akan ditulis serta mendukung hasil pemikiran sang penulis dalam mengungkap suatu masalah dalam penelitiannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan menggunakan sejumlah karya ilmiah untuk membantu penulis dalam menyelesaikan studinya.

Kajian Pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian. Dalam kajian pustaka dapat berupa buku, arsip dan dokumen lainnya. Disini penulis menggunakan sumber pustaka dalam melakukan penelitian seperti buku *Paco-Paco Kota Padang karya Freek Colombijn*, buku *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern: Respons Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*, buku *Kota Padang Tempo Doeloe (Zaman Kolonial) karya Prof Mestika Zed*, dan buku *Sejarah Kota Padang karya Gusti Asnan, Syafrizal, Mardanas Safwan, dan Ishaq Thaher*, dan arsip-arsip Belanda lainnya serta buku *Padang Riwayatmu Dulu karya Rusli Amran*.

Buku *Paco-Paco Kota Padang* ini memberikan penjelasan yang sangat memadai tentang Kota Padang. Meski ditulis lebih dari limabelas tahun yang lalu, namun masih sangat relevan untuk memberikan perspektif masa lalu tentang persoalan kota Padang belakangan ini. Selain itu, sebagai sebuah karya akademis dengan data-data komprehensif dapat juga dijadikan landasan bagi studi tentang kota-kota kontemporer di Indonesia, khususnya Kota Padang. Apa gunanya mempelajari sejarah dan perkembangan sebuah kota? Oleh karena ruang kota tersebut adalah kenangan bersama bagi penghuninya yang kemudian akan memberikan sumbangan yang besar kepada pembentukan wujud kotanya. Wujud

tersebut akan dapat ditelusuri dan ditemui kembali melalui perkembangan lapis-lapis sejarah kota. Oleh karena itu, sangatlah perlu memahami kota sebagai sebuah entitas yang selalu berkembang, dan melalui pemahaman perkembangan itu sejarah masa depan kota bisa dirancang bersama oleh warga kota.

Elizabeth Graves, *Asal –Usul Elit Minangkabau Modren: Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad IX/XX*”. Dalam karya ini Graves berusaha menjelaskan awal dari terbentuknya suatu elit di Minangkabau pada abad ke -20 yang memiliki peran dalam sistem birokrasi kolonial. Ia melakukan analisis tentang asal – usul elit modren Minangkabau yang merupakan produk dalam pendidikan diberikan oleh pemerintah kolonial sampai dengan runtuhnya elit tersebut. Graves memberikan kesimpulan intervensi kekuasaan kolonial di Minangkabau menyebabkan hancurnya kekuasaan elit tradisional kelas atas digantikan dengan mobilitas kelas menengah terpelajar hasil dari pendidikan sekuler yang menjadi awal terbentuknya elit Minangkabau modern.

Mestika Zed, *Kota Padang Tempo Doeloe (Zaman Kolonial)*. Dalam karya ini Prof Mestika menjelaskan bagaimana keadaan kota padang zaman kolonial, awal mula terbentuknya kota padang dengan segala bentuk perubahannya. Jumlah penduduk yang semakin bertambah dari abad 18 ke abad 19. Selain itu, buku ini juga memaparkan bagaimana sistem pemerintahan kolonial Belanda di kota Padang dulunya dengan mengangkat penghulu dari kalangan bangsawan, pergolakan politik yang terjadi, dll.

Rusli Amran, *Padang Riwayat Mu Dulu*. Buku ini bukanlah buku yang bersifat sejarah kota Padang. Bangsa Belanda memang banyak meninggalkan tulisan, namun hal-hal yang mereka kemukakan seringkali jauh berbeda dengan

apa yang dibutuhkan. Mencari sumber-sumber Belanda yang menarik bagi penduduk Kota Padang sungguh sulit. Itu sebabnya buku ini bisa dianggap sebagai semacam bunga rampai tentang Padang tempo dulu. Kebanyakan bahan diperoleh dari koran dan majalah, peninggalan pribadi tersimpan di beberapa arsip, bagian-bagian kecil dari beberapa karangan mengenai kota Padang dapat ditemukan dalam buku ini.



E. Kerangka Analisis

Tulisan yang berjudul “Penghulu Nan Salapan Suku di Kota Padang Masa Kolonial” merupakan kajian sejarah sosial-budaya. Penulisan sejarah membutuhkan kerangka teori agar dapat memahami fenomena sosial. Sebuah teori tidak hanya perlu menggeneralisasi dari fakta-fakta yang diamati, tetapi juga perlu menyediakan kerangka kerja terarah untuk mengkategorikan dan menganalisis fakta-fakta sejarah yang dikumpulkan dalam penelitian.⁶

Sebagaimana dikemukakan oleh Ibrahim Alfian, fungsi teori adalah membantu menemukan masalah-masalah yang hendak diteliti, yaitu mengidentifikasi problema-problema dan menyajikan kategori-kategori dalam mengorganisasi data.⁷

Penghulu dapat dikatakan sebagai pemimpin masyarakat Minangkabau. Ia memimpin dan mewakili orang-orang sesukunya. Seorang penghulu memiliki persyaratan substansial yaitu: “Lubuk akal. Lautan budi, tahu diadat dan pusako, tahu menimbang sama berat, tahu menggagak menggagihkan” (Hanafi, 1970:33). Penghulu adalah pelindung dan pemimpin rakyat dalam arti sebenarnya.

Dalam teorinya, seorang penghulu harus dipilih dari figur yang dianggap paling bijaksana, paling mampu dan seorang laki-laki yang paling jernih pandangannya diantara anggota keluarganya. Jabatan kepenghuluan seringkali dipergilirkan diantara kelompok cabang keluarga tertentu. Dalam kenyataannya, seorang penghulu biasanya diperkuat oleh beberapa kelebihan

⁶ Hasan dan Koentjaraningrat, *Beberapa Azas Metodologi Ilmiah*, dalam Koentjaraningrat (ed). PT. Gramedia: Jakarta. Hal 8-23; lihat Sartono Kartodirdjo, 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. (Jakarta: Gramedia, 1977) hal 1-4.

⁷ Teuku Ibrahim Alfian, *Dimensi Teori Dalam Wacana Ilmu Pengetahuan*. Makalah.

tertentu seperti kekayaan keluarganya dan pengaruh pribadi sebagai hal yang menentukan persaingan dalam lingkungan internal.⁸

Ninik Mamak dalam masyarakat Minangkabau sering disebut dengan Datuk/Penghulu dan juga sebagai kepala kaum. Penghulu atau ninik mamak bergelar datuk, datuk artinya orang yang berilmu, orang yang pandai, yang di tuakan. Jadi, Ninik Mamak adalah orang yang memiliki kedudukan yang utama dalam kehidupan masyarakat adat.

Selain itu, penghulu juga berperan dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan terkait dengan harta pusaka di kaumnya untuk mensejahterahkan, menuntut dan menutup malu kaumnya. Kemudian, penghulu juga akan menyelesaikan perselisihan antar kaumnya.

Hal lain dari kedudukan penghulu bahwa kedudukannya dalam tiap nagari tidak sama. Ada nagari yang penghulunya mempunyai kedudukan yang setingkat dan sederajat. Dalam pepatah adat disebut “duduk sama rendah tegak sama tinggi”. Penghulu yang setingkat dan sederajat ini adalah di nagari yang menganut “laras” (aliran) Bodi-Caniago dari keturunan Datuk Perpatih nan Sabatang. Sebaliknya ada pula nagari yang berkedudukan penghulunya bertingkat-tingkat yang didalam adat disebut “berjenjang naik bertangga turun”, yaitu para Penghulu yang menganut laras (aliran) Koto Piliang dari ajaran Datuk Katumanggungan.

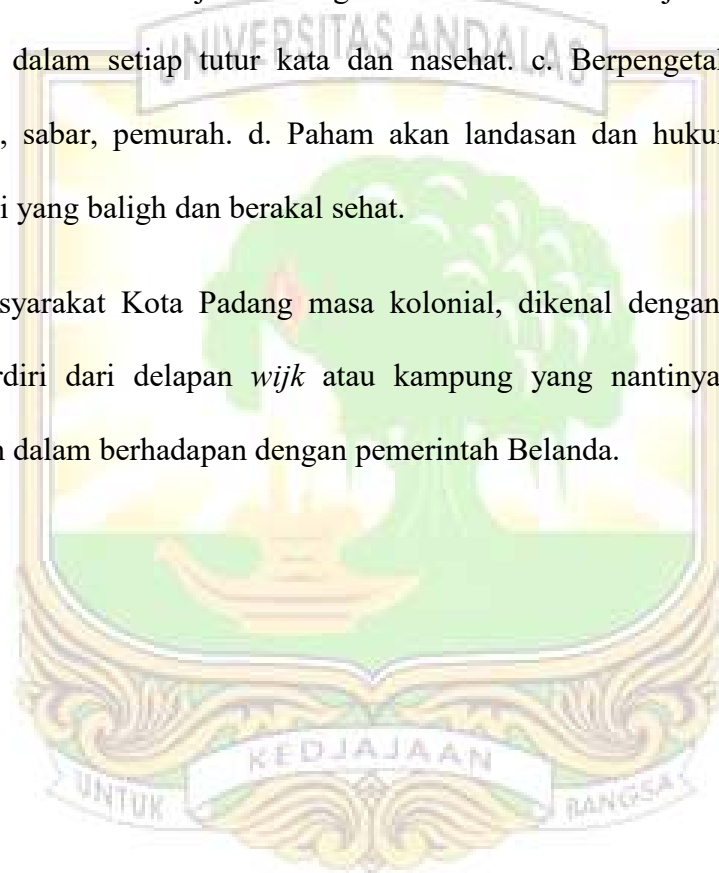
Kendati kedudukan penghulu berbeda di kedua ajaran adat itu, namun keduanya menganut paham demokrasi. Demokrasi itu tidak ditunjukkan pada cara duduknya dalam persidangan, dan juga bentuk balai adatnya yang memang

⁸ Elizabeth Graves, "Asal -Usul Elit Minangkabau Modren: Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad IX/XX.

berbeda, tetapi demokrasiya ditentukan pada sistem “musyawarah-mufakat”. Kedua sistem itu menempuh cara yang sama dalam mengambil keputusan yaitu dengan cara “musyawarah untuk mufakat”. Jadi, Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) adalah orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat adat.

Dalam peraturan adat Minangkabau untuk menjadi seorang pemimpin masyarakat, Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) harus memiliki sifat dan ketentuan sebagai berikut: a. Taat menjalankan agama Islam. b. Berfikir jernih, berakal sehat, tampak dalam setiap tutur kata dan nasehat. c. Berpengetahuan luas, berhati lapang, sabar, pemurah. d. Paham akan landasan dan hukum adat. e. Hanya laki-laki yang baligh dan berakal sehat.

Dalam masyarakat Kota Padang masa kolonial, dikenal dengan penghulu suku yang terdiri dari delapan *wijk* atau kampung yang nantinya memiliki dualisme peran dalam berhadapan dengan pemerintah Belanda.



F. Metode Penelitian

Metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil dalam bentuk tulisan.

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman-rekaman dan peninggalan masa lampau. Menurut Kuntowijoyo dalam kedudukannya sebagai ilmu, sejarah terikat pada prosedur penelitian ilmiah, sejarah juga terikat pada penalaran yang bersandar pada fakta, kebenaran sejarah terletak pada kesediaan sejarawan untuk meneliti sumber sejarah secara tuntas sehingga diharapkan ia akan mengungkap sejarah obyektif.

Penulisan ini menggunakan pendekatan sosial-budaya. Pengumpulan sumber didasarkan pada studi kepustakaan seperti buku, arsip, dan menggunakan sumber lisan seperti wawancara. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tahapan-tahapan tersebut sebagai mata rantai yang saling berpengaruh dan sebagai urutan yang harus dikaji dan analisis secara mendalam dalam penulisan sejarah. Metode penelitian sejarah terdiri dari empat langkah yaitu heuristik/pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi/penafsiran, dan historiografi/penulisan.⁹ Adapun langkah-langkah tersebut adalah:

a. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Heuristik merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian sejarah, yaitu suatu kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data, atau materi sejarah. Mengumpulkan data yang terdiri dari sumber primer antara lain arsip kota Padang masa kolonial, pamflet. Sedangkan sumber sekunder berupa

⁹ Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hal. 256.

buku, makalah, jurnal, skripsi, desertasi yang sesuai dengan penelitian yang dikaji. Kemudian sumber ini juga diperoleh dari data wawancara dengan menggunakan pendekatan sejarah lisan. Wawancara diperoleh dari beberapa budayawan, penghulu, cadiak pandai, dll. Dalam mendapatkan sumber masa belanda, penulis menggunakan website *delpher.nl*.

b. Kritik sumber

Yaitu kegiatan meneliti apakah jejak-jejak itu sejati, baik bentuk maupun isinya, sehingga benar-benar merupakan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan. Maka diperlukan kritik intern dan ekstern. Kritik ekstern bertujuan untuk menentukan autentitas sumber, baik keaslian sumber, tanggal, waktu pembuatan, serta pengarang. Kritik intern bertujuan untuk menentukan kredibilitas sumber, baik isi, sumber, atau dokumen, meliputi bahasa dan situasi pengarang, gaya, dan ide.

c. Interpretasi atau Penafsiran

Selanjutnya interpretasi yaitu hal menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang telah diperoleh setelah diterapkan kritik ekstern maupun kritik intern dari data-data yang didapatkan sehingga memberikan kesatuan berupa bentuk peristiwa lampau sebagai latar belakang penelitian dan berkaitan dengan konteks masa kini. Melalui sumber yang telah didapat tersebut akan dilihat bagaimana hubungan sebab akibat dari peristiwa yang terjadi dan keterpihakan posisi si penulis dalam karya yang akan dibuatnya. Sebab data-data tersebut tidak dapat terungkap kebenarannya tanpa diberi keterangan yang mengikutinya oleh peneliti. Tahap ini digunakan untuk

menafsirkan informasi yang diperoleh dan mengelompokkannya kedalam sumber yang valid.

d. Penyajian atau Historiografi

Yaitu menyampaikan sintesis yang diperoleh dalam bentuk tulisan atau dengan kata lain penyampaian. Laporan hasil penelitian sejarah setelah melalui tahapan-tahapan di atas dalam bentuk karya sejarah (historiografi), dengan menggunakan standar akademik penulisan ilmu sejarah.



G. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan ini dibagi kedalam V Bab. Antara satu bab dengan bab berikutnya saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan. Untuk memperjelas penulisan, maka penulis membagi atas beberapa pokok yaitu:

Bab I berupa pendahuluan, pada bab ini memberikan suatu informasi secara garis besar dan umum mengenai penulisan. Pada bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian dan bahan sumber serta sistematika penulisan.

Bab II berupa pembahasan mengenai kota Padang masa kolonial, terbentuknya penghulu nan salapan suku, migrasi penduduk, dan masyarakat plural masa kolonial.

Bab III berupa pembahasan mengenai kebijakan pemerintah kolonial terhadap peningkatan status kota Padang, wilayah *wijk* dan kekuasaan penghulu nan salapan suku, serta keberadaan dan otoritas penghulu nan salapan suku.

Bab IV berupa pembahasan mengenai peranan Demang dan Lembaga KAN Penghulu Nan Salapan Suku Kota Padang

Bab V. PENUTUP

Kesimpulan yang berisikan keseluruhan hasil penulisan-penulisan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.